



Buletin

# Parlementaria

Nomor 997/I/III/2018 • Maret 2018



## DPR SIMPATI Atas Korban Longsor Brebes

Fadli : Kenaikan BBM Harus Ditolak

TIDAK  
DIPERJUAL  
BELIKAN





Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Menteri Sosial mengunjungi lokasi bencana longsor di Brebes

foto: jayadi/od

# DPR Simpati Atas Korban Longsor Brebes

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo beserta Menteri Sosial Idrus Marham mengunjungi dan melihat langsung lokasi bencana dan kondisi masyarakat yang terkena musibah tanah longsor di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (27/2).**

“Saya sungguh berduka atas bencana ini. Terlebih berdasarkan data korban terakhir, korban meninggal 11 orang, 7 hilang belum ditemukan, 12 luka-luka, 642 orang mengungsi di Desa Capar, 196 orang mengungsi di Desa Pasir Panjang dan 36 rumah rusak berat,” ujar Bamsuet, panggilan akrabnya, usai meninjau lokasi tanah longsor.

Usai meninjau lokasi tanah longsor, Bamsuet juga mengunjungi lokasi pengungsian di Kecamatan Salem. Pada kesempatan itu keduanya juga memberi bantuan sosial sebesar Rp 1,6 miliar yang diterima langsung para korban. Bamsuet juga mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi longsor, karena berbahaya adanya longsor susulan. Apalagi jika terjadi hujan, material longsor yang labil akan mudah terjadi longsor susulan.

“Selain memberikan bantuan, Saya juga ingin memberikan empati dan semangat kepada saudara-saudaraku yang terkena musibah. Mereka tidak menghadapi ini sendirian, ada saya dan seluruh saudara-saudara lain yang ikut memberikan semangat dan uluran tangan,” papar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Kabupaten Brebes telah menetapkan masa tanggap darurat dari 22 Februari - 7 Maret 2018. Bamsuet berharap, selama masa tanggap darurat ini, berbagai unsur pemerintah seperti BNPB, Kementerian Sosial, dan pihak lainnya bisa bersatu padu mengatasi musibah ini. Sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala.

“Fungsi DPR RI sebagai lembaga legislatif adalah memastikan eksekutif dalam hal ini yang diwakili Kementerian

Sosial bisa segera melakukan langkah-langkah penanganan bencana. Saya yakin Menteri Sosial Pak Idrus Marham bisa menjadi *leader* dan mengkoordinir pendistribusian bantuan secara cepat dan tepat. Sehingga bisa mengurangi beban saudara kita yang terkena musibah bencana,” jelas Bamsuet.

Tidak lupa Bamsuet juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk selalu menjaga alam dan lingkungan sekitar. Keasrian dan kelestarian alam merupakan hal yang penting dalam terciptanya keseimbangan hidup. Baginya, bersahabat dengan alam adalah cara terbaik kita terhindar dari berbagai musibah.

“Mari kita jaga alam dan lingkungan sekitar. Karena keharmonisan hidup bukan hanya antara sesama manusia saja, melainkan juga dengan alam dan lingkungan sekitar,” pungkasnya. ■ (ayu/scc)



# Peredaran Narkoba di Indonesia Sudah Seperti Kanker Stadium Empat

Indonesia diserbu berton-ton narkoba. Terakhir, aparat Indonesia telah berhasil mengungkap penyelundupan narkoba setidaknya 3 ton jenis sabu-sabu di Kepulauan Riau. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai, peredaran narkoba di Indonesia sudah kronis, bahkan seperti kanker stadium empat.

“Penyelundupan dan peredaran narkoba di Indonesia bukan hanya kronis, tapi sudah seperti kanker stadium empat. Beberapa gram narkoba saja sudah bisa merusak generasi bangsa, apalagi sampai berton-ton. Penyelundupan narkoba harus dilacak, dan dihentikan,” tegas Taufik, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2).

Politisi F-PAN itu pun mendorong beberapa pihak terkait, seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, hingga Polair, untuk semakin mewaspada berbagai modus penyelundupan narkoba melalui daerah perbatasan, dan masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’.

“Aparat harus mewaspada pelabuhan-pelabuhan ‘tikus’ di pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Patroli harus semakin diperketat. Karena wilayah-wilayah itu rawan terhadap penyelundupan narkoba,” tandas Taufik.

Ketika diminta pendapat terkait banyak narapidana yang menjadi pengendali narkoba, padahal telah mendapat vonis hukuman mati, Taufik mendorong Kejaksaan Agung untuk segera melakukan eksekusi mati. Hal ini menjadi ironi, ketika Indonesia bertekad melawan narkoba, namun masih ada napi yang mengendalikan peredaran narkoba.

“Kejaksaan Agung tidak boleh kompromi dengan napi yang mengendalikan narkoba. Bahkan, napi narkoba yang sudah divonis hukuman mati, harus diprioritaskan untuk segera dieksekusi,” tegas Taufik.

Dalam kesempatan berbeda, Jaksa Agung H.M Prasetyo mengaku akan memprioritaskan hukuman mati untuk napi pengendali narkoba. Prasetyo memahami, banyak narapidana yang bahkan sudah divonis mati pengadilan tetap menjadi pengendali narkoba dari balik jeruji besi. Ia berjanji eksekusi mati berikutnya akan memprioritaskan para narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba. ■ (mp/sf)



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

## WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

## PIMPINAN PELAKSANA

Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

## PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

## WK. PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),

Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),

Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)

## REDAKTUR

Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi

## SEKRETARIS REDAKSI

Hasri Mentari, Guntur Dewanto

## ANGGOTA REDAKSI

Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,

Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,

Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega,

Ila Rachmayati, Mahir Pratama, Taufan Syahrulli

## REDAKTUR FOTO

Eka Hindra, Iwan Armanias

## FOTOGRAFER

Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,

Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief

Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

## ADMINISTRASI

Bagus Mudjiharjanto, Luthfi Suci Nur 'Aini,

Damar Maulana Taher

## ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI

Gedung Nusantara II Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,

e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

### STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom, Erman Suhendri, S.Sos.I,

Mustaqim, S.Kom.I

### DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

### ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Mujiono

### PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon,

Yuliana Puspita, Ifan

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

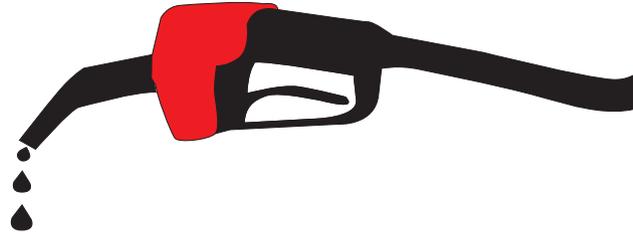
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Fadli : Kenaikan BBM Harus Ditolak

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan pemerintah hendaknya tidak menaikkan harga BBM nonsubsidi di tengah isu daya beli masyarakat yang semakin menurun. Kenaikan BBM ini menurutnya harus ditolak.



Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon

dikatakan yang nonsubsidi, saya kira Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah menyatakan bahwa tidak boleh harga BBM itu disesuaikan dengan mekanisme pasar internasional," paparnya.

La berpendapat, semua kekayaan yang dikuasai negara adalah sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat. Jadi, lanjut Fadli, harus ada satu ketegasan dari pemerintah untuk tidak menyulitkan rakyat.

"Kenaikan BBM ini harus diprotes, karena pemerintah tidak mampu memberikan suatu kemudahan dan fasilitas kepada rakyat terkait dengan BBM ini jadi harus ditolak," imbuhnya.

Diketahui, terhitung sejak 24 Februari, Pertamina menaikkan harga minyak nonsubsidi seperti Pertamina, Dexlite maupun Peralite. Kenaikan harga sekitar Rp300 untuk wilayah Jawa dan Bali; sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam. Harga Pertamina di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp8.900 di Jakarta. Harga Dexlite naik dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 8.100 per liter. ■ (tn/sc)

Hal tersebut disampaikan kepada awak media, menanggapi kenaikan harga minyak nonsubsidi sejak 24 Februari 2018.

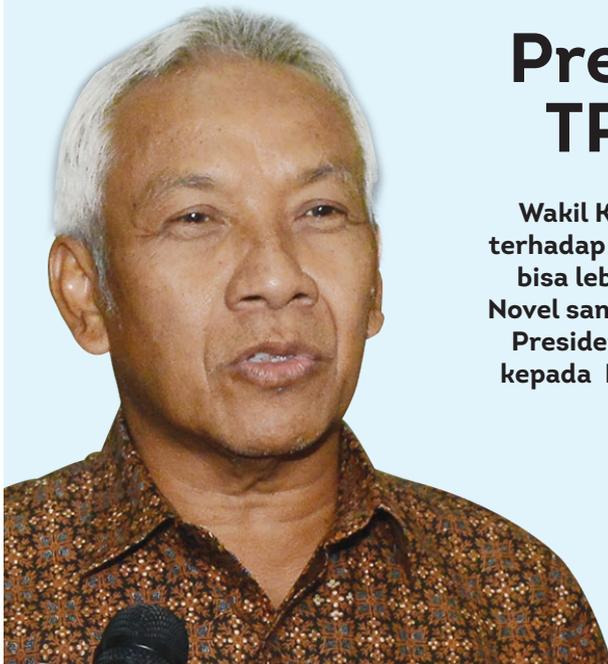
"Walaupun yang dinaikkan adalah BBM nonsubsidi, pemerintah seharusnya memikirkan kembali bahwa daya beli

masyarakat semakin berkurang. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia tidak kondusif," kata Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/2).

Menurut politisi Gerindra tersebut, kenaikan BBM yang sesuai dengan mekanisme pasar ini sebenarnya melanggar UUD 1945. "Meskipun ini

# Presiden Diminta Bentuk TPF untuk Kasus Novel

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan harus dibuat Tim Pencari Fakta (TPF) agar bisa lebih fokus dan cepat dalam pengungkapannya. "Kasus pak Novel sampai hari ini belum terungkap. Dari awal saya menginginkan Presiden Jokowi membuat TPF dan tidak hanya menyerahkannya kepada Kepolisian semata," ujar Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jum'at (23/2).



Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto

Agus mengatakan kasus Novel ini cukup sulit dan pelik sehingga perlu ada penanganan hukum yang lebih fokus

selain dari pihak Kepolisian. "Harus ada penanganan yang lebih fokus. TPF ini akan berisikan orang dari pihak Kepolisian, pakar hukum, psikologi sehingga dengan berkumpul beberapa pakar yang berbeda kemampuan akan lebih memudahkan penyelidikan," ujarnya.

# Komisi III Terima Masukan RUU Jabatan Hakim

**Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI menerima masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, khususnya terkait dengan kewenangan Peradilan Militer. Peradilan Militer merupakan lingkungan peradilan yang melaksanakan kekuasaan peradilan kehakiman, mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Diketahui, sejak 2004, Markas Besar TNI telah resmi mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Militer ke Mahkamah Agung (MA).**

**A**nggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, semua pihak harus mencermati norma rumusan Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim Pasal 4 Ayat (1) dan (2). Dijelaskannya, Ayat (1) menyatakan bahwa Hakim Peradilan Militer merupakan bagian dari lingkup peradilan lainnya yang bermuara dan memuncak kepada Mahkamah Agung.

“Hal ini menegaskan ada kepastian hukum bahwa MA adalah pembina dari seluruh hakim yang ada di Indonesia. Kemudian pada Ayat (2) untuk hakim peradilan militer, diklasifikasikan siapa dia, kapasitasnya seperti apa, yang diatur dalam rumusan peraturan perundang-undangan tersendiri,” kata Arteria saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Gedung Pertemuan Pengadilan

Seperti diketahui, Novel Baswedan 10 bulan lalu diserang orang tak dikenal, namun belum ada satupun yang dinyatakan sebagai pelaku. Pada 11 April 2017, Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal setelah menunaikan salat Subuh di Masjid Al Ihsan yang terletak tak jauh dari rumah Novel.

Akibat serangan tersebut, Novel mengalami luka pada matanya dan harus berobat di Singapura sejak 12 April 2017 silam. Hingga kini, pelaku penyerangan Novel masih belum terungkap.

Setelah menjalani perawatan di Singapura, Novel diizinkan pulang ke Indonesia pada 22 Februari 2018. Sebelum tiba di rumahnya, Novel mengunjungi Gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. ■ (mhr/sc)



Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

**Negara ini menganut asas koneksitas. Dan pasca reformasi, dipastikan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam konteks pidana militer kita kanalkan ke Peradilan Militer. Tapi di luar itu, anggota militer yang melakukan penyimpangan tindak pidana umum itu kita kembalikan kepada ranah umum yaitu Peradilan Umum.**

Tinggi Bali, Selasa (27/2). Tim Kunker dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa.

Arteria melihat, tidak ada permasalahan dalam regulasi itu. Namun yang dipermasalahkan adalah terkait isu kewenangan, yaitu kewenangan lingkup

peradilan militer yang diperluas menjadi pidana umum yang dilakukan oleh para anggota militer. Arteria mengatakan bahwa isu itu disampaikan oleh TNI dan telah digodok oleh Panja RUU Jabatan Hakim.

“Kami sampaikan juga bahwa negara ini menganut asas koneksitas. Dan pasca reformasi, dipastikan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dalam konteks pidana militer kita kanalkan ke Peradilan Militer. Tapi di luar itu, anggota militer yang melakukan penyimpangan tindak pidana umum itu kita kembalikan kepada ranah umum yaitu Peradilan Umum. Penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran bahwa akan ada resistensi penyidik mengalami kesulitan mengenai karakter kemiliteran seperti di kapal perang dan lain sebagainya, Politisi F-PDI Perjuangan itu mengatakan, inilah yang menjadi rekayasa hukum dan rekayasa sosial.

“RUU tentang Jabatan Hakim merupakan rekayasa sosial yang memastikan siapa pun termasuk TNI sekalipun harus tunduk pada UU dan harus mau diatur dan dikelola. Sepanjang melakukan tindak pidana umum. Itu kita kanalkan ke peradilan umum,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala Peradilan Militer Bali M. Djundan menerangkan dalam RUU tentang Jabatan Hakim belum menjangkau hakim militer, karena Peradilan Militer diatur dalam perundangan tersendiri, yakni UU Peradilan Militer yang hanya mengadili militer.

Lebih lanjut Djundan menjelaskan, kemandirian hakim harus diperbaiki. Tetapi pada kenyataannya ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara MA dan Panglima TNI, bahwa Mabes TNI dapat menarik hakim militer tanpa sepengetahuan MA. Hal ini membuat perasaan mandiri dan masih terikat. “Hakim Militer dan Peradilan Militer harus mandiri tanpa campur tangan Mabes TNI,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Djundan mengeluhkan, setelah berpisah dengan Mabes TNI pada tahun 2004, dan berada di lingkup MA, fasilitas kantor, rumah dinas, maupun rumah dinas di Peradilan Militer Bali menjadi minim. Bahkan, Peradilan Militer Bali tidak mempunyai Gedung Pengadilan. “Kami Mohon Komisi III dapat mendorong MA mendirikan gedung Peradilan militer Denpasar, dan rumah jabatan,” harap Djundan. ■ (as/sf)



Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau Program Intensifikasi Perkebunan Kakao di Sulawesi Tengah

## Impor Kakao Terjadi Karena Produksi Dalam Negeri Rendah

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono menyayangkan masih tingginya angka impor komoditi kakao akibat penurunan produksi dari perkebunan petani dalam negeri. Hal ini diutarakan Roem Kono saat dirinya memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau Program Intensifikasi Perkebunan Kakao di Desa Sibowi, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (19/2).**

“Jika melihat luas lahan perkebunan kakao yang kita miliki mencapai jutaan hektar, seharusnya impor komoditi kakao tidak perlu terjadi. Kita bahkan seharusnya yakin bisa wujudkan swasembada kakao,” ungkap Roem optimis.

Politisi Golkar ini menengarai masalah serangan hama PBK menjadi salah satu faktor penyebab turunnya produktivitas

perkebunan kakao para petani, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait untuk segera menanggulangnya.

“Bupati, Kadis Perkebunan, Perwakilan dari Pupuk Kaltim dan juga BUMN Sang Hyang Seri yang menyediakan bibit unggul harus sinergi untuk memenuhi kebutuhan para petani sehingga tercapai peningkatan produksi kakao melalui program

intensifikasi,” pinta Roem Kono.

Bupati Sigi Mohammad Irwan yang ikut mendampingi kunker tersebut menjelaskan bahwa Intensifikasi Kakao oleh Gapoktan Harapan Jaya di Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten yang menjadi target lokasi Program Intensifikasi Kakao di Provinsi Sulawesi Tengah, karena terletak di dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu yang menjadi



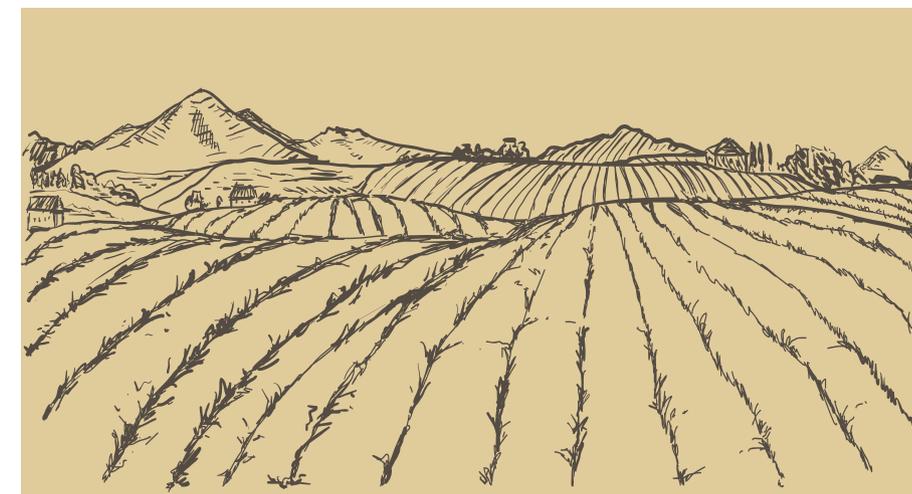
Foto: oji/hr

lokasi industri pengolahan kakao.

Sementara Dirjen Perkebunan Kementan Bambang yang mendampingi Tim Komisi IV DPR, memaparkan bahwa dalam program intensifikasi, Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah memilih para petani kakao yang memiliki lahan kakao dengan umur tanaman yang masih relatif muda dan produktif.

“Para petani diberikan sejumlah bantuan seperti pupuk dan obat-obatan herbisida serta pendampingan dalam melaksanakan intensifikasi tersebut,” jelas Bambang.

Program intensifikasi yang sudah dimulai sejak tahun 2015 ini memiliki target peningkatan produktivitas kakao Provinsi Sulawesi Tengah dari rata-rata 1 ton/hektar menjadi 1,5 - 2 ton/hektar, mulai tahun 2016,” tutupnya. ■ (oji/sc)



## Petani Transmigran Ubah Tradisi Pola Tanam Petani Manokwari

**Masyarakat transmigran di Manokwari yang berasal dari Pulau Jawa berhasil mengubah tradisi pola tanam para petani lokal. Perubahan itu, dari pola tanam berpindah-pindah lahan ke pola tanam di satu lahan sawah saja. Perubahan pola tanam ini diharapkan memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.**

**D**emikian disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Agung Widiantoro di Manokwari, Kamis (15/2). “Kini masyarakat lokal sudah menyadari pola bertanam di satu lahan sawah lebih baik. Hasil pertaniannya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lokal di Manokwari,” ujarnya.

Perubahan tradisi pola tanam ini sudah dirasakan positif oleh para petani lokal. Perubahan pola tanam ini menyusul adanya program cetak sawah di Manokwari, Papua Barat. Program ini telah menyatukan tradisi pola tanam petani setempat.

Menurut Agung, ada beberapa catatan penting menyangkut cetak sawah ini. Menurutnya, proyek cetak sawah berada di wilayah strategis dengan sumber pengairan yang baik. “Hanya saja sumber air yang digunakan untuk irigasi sawah ini diharapkan air yang memenuhi unsur hara. Selain itu dibutuhkan pula kapur untuk tanaman padi di sini,” ungkap anggota F-PG DPR ini.

Ia juga mengapresiasi pola kerja sama TNI dengan Kementerian Pertanian.

Program ini katanya bisa meningkatkan produksi sekaligus kedaulatan pangan.

■ (mh/sc)



Foto: husen/hr

Anggota Komisi IV DPR RI Agung Widiantoro



Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau persawahan abadi di Tabanan, Bali

## Lahan Sawah Abadi di Bali Semakin Menyusut

**Luas lahan tanam persawahan abadi yang sudah ditetapkan oleh UNESCO di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, semakin menyusut dari tahun ke tahun. Luas persawahan yang berkurang sekitar 352 hektar dalam setahun, dan diperparah dengan tidak adanya cetak sawah baru dan aturan yang tegas dari Pemerintah Provinsi Bali.**

“Ini merupakan tantangan besar untuk Pemprov Bali. Dalam satu tahun, 325 hektar sawah berkurang dan tidak ada cetak sawah baru. Pemprov Bali harus memberikan tindakan yang tegas, karena sawah abadi ini sudah menjadi warisan budaya dunia,” ungkap Wakil Ketua Komisi

IV DPR RI Viva Yoga Mauladi saat meninjau lokasi persawahan di Tabanan, Bali, Selasa (20/2).

Dalam Kunjungan Kerja ke lokasi persawahan itu, Komisi IV DPR RI menemukan banyak masalah yang menyebabkan semakin berkurangnya

area sawah, diantaranya beralihnya lahan sawah menjadi rumah dan irigasi yang tidak lancar.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengatur bahwa Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip menuturkan undang-undang tersebut harus diadopsi dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

“Sehingga lahan-lahan di Bali ini dapat terlindungi dengan baik, dan peraturan ini kita tegakkan dan harus ditindak tegas,



foto: ryan/od

# Pilkada Jateng Rawan Instabilitas

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah mengatakan, pada tahun 2018 ini ada 8 Pilkada yang akan diselenggarakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yakni 1 Pilkada Provinsi, 6 Pilkada Kabupaten, dan 1 Pilkada Kota. Berdasarkan peta kerawanan Pilkada yang dibuat oleh Polda Jateng, kedelapan Pilkada tersebut berpotensi menjadi *entry point* instabilitas sosial di masyarakat Jawa Tengah.

“ Dalam pertemuan dengan Polda beserta BNN Jawa Tengah, Komisi III menekankan agar jajaran Polda Jawa Tengah lebih mengoptimalkan personel Polri di berbagai daerah hingga di pelosok desa, dengan sistem pengamanan yang efektif dan efisien,” ujar Basarah di Semarang, Jateng, Selasa (27/2).

Komisi III berharap Kepolisian mampu menerapkan prinsip penegakan hukum sebagaimana diatur di dalam undang-undang, yakni memberikan ancaman pidana kepada siapapun yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mengeksploitasi isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Norma itu ada di dalam UU Pilkada, UU ITE, dan UU Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Saya kira, ketiga Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman oleh Polda Jawa Tengah untuk melakukan berbagai upaya antisipasi terhadap oknum atau kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan momentum Pilkada dengan memainkan isu SARA,” tandas politisi F-PDI Perjuangan itu.



Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah

foto: ryan/hr

apabila ada peralihan fungsi lahan,” tutur politisi dapil Bali itu.

Sebelumnya, Ketua Tani di Desa Jatiluwih I Nyoman Utama menuturkan, salah satu penyebab area sawah berkurang adalah air yang tidak mengalir dengan deras, “Dulu, air disini mengalir sangat deras dari hulu ke hilir, dan kita juga punya terowongan air, tapi terowongan tersebut jebol dan airnya bocor, sehingga tidak bisa mengalirkan air dengan baik,” tutur Nyoman.

Nyoman menambahkan, petani sangat membutuhkan pasokan air yang cukup. Melalui kedatangan Komisi IV DPR RI ini, pihaknya meminta bantuan untuk membangun embung, guna membuat lahan sawah abadi kembali produktif, sehingga lahan tanam tidak berkurang setiap tahunnya. ■ (rh/sf)

Namun demikian, lanjutnya, Polri juga mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. “Maka penegakan hukum dimaksud, juga harus diawali dengan berbagai langkah-langkah persuasif, yakni mengajak masyarakat agar tidak terlibat atau terprovokasi oleh kegiatan yang mengandung unsur SARA tersebut,” pesan Basarah. ■

(dep/sf)



# DPR Dorong Pengembangan Energi Gas Alam di Kaltara

**Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mendorong pemanfaatan energi gas alam di Kalimantan Utara untuk dikembangkan, melihat tingginya permintaan warga terhadap jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas). Menurutnya, selain ekonomis, jaringan gas disisi lain dapat meningkatkan daya beli masyarakat.**



Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di Kalimantan Utara

menilai produk Jargas dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan gas masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah.

“Bukan harganya saja yang murah, tapi kalau ada kebocoran Jargas dapat segera diidentifikasi dan juga higienis. Walaupun begitu, kita tetap harus menjaga keamanannya, agar penggunaan Jargas ini benar-benar aman bagi masyarakat,” ujar Herman sembari mengingatkan warga agar tetap memperhatikan keamanan Jargas.

Ia menambahkan, Komisi VII DPR RI akan terus mendorong penambahan sambungan baru untuk rumah tangga. Hanya saja, sambungannya, daerah yang menjadi prioritas adalah daerah yang memiliki potensi sumber gas alam.

“Kalau ada gasnya, pasti program ini langsung kita laksanakan karena yang menjadikan Jargas ini ekonomis adalah bagaimana menghantarkan elpiji langsung kepada masyarakat. Karena itu, ini adalah program afirmatif dari PGN atas persetujuan DPR dan pemerintah. Silahkan dimanfaatkan dengan baik dan tolong dijaga,” sambungnya.

Herman mengatakan, tahun ini PT PGN akan membuat 80.000 sambungan baru untuk rumah tangga (SR) di beberapa daerah di Indonesia. Sementara untuk Provinsi Kaltara akan mendapat 4.695 SR di empat Kelurahan. “Ini akan dilakukan PT PGN secara bertahap sesuai dengan anggaran yang ada,” tambah politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelum mengakhiri peninjauan lapangan, Anggota Komisi VII DPR RI lainnya, yakni Ari Yusnita (F-Nasdem), Pegg Patricia (F-PKB) dan Ramson Siagian (F-Gerindra) menyempatkan diri berdialog dengan warga setempat terkait efektivitas penggunaan jargas. Herman bahkan mengecek pelayanan *call center* Jargas agar masyarakat bisa melakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebocoran. ■ (ann/sf)

Demikian diungkapkan Politisi dari F-Demokrat ini saat melakukan peninjauan Jaringan Gas milik PT PGN yang telah terpasang di rumah warga di RT 15, Kelurahan Karang Anyar Pantai Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (22/2).

“Kalau dibandingkan harga elpiji, Jargas lebih murah, artinya bisa

mengurangi ongkos bahan bakar dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena itu, jargas bagi kami bisa dijadikan program utama untuk disebarluaskan kepada masyarakat secara masif,” papar Herman disela-sela peninjauannya.

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat karena tidak perlu lagi mencari lagi tabung gas elpiji, Herman

## PT Adaro Diminta Perhatikan Pemulihan Lingkungan, CSR dan PLTU

**Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto meminta kepada PT Adaro agar memperhatikan tiga aspek penting dalam menjalankan aktivitas pertambangan, yakni pemulihan lingkungan pasca eksploitasi, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.**

Terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, Daryatmo menanyakan rumus prosentase pemberian CSR, yang sebelumnya dilaporkan sudah menggelontorkan dana sebanyak Rp 40 miliar. Dari dana



Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto

foto: eko/hr

wilayah-wilayah menuju pertambangan. Sepanjang jalan ada tiang-tiang listrik berderet, tetapi infonya gelap gulita jika malam tiba. Berarti tidak ada penerangan jalan umum. Apakah yang seperti itu bisa didekati dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau bersama dengan Pemda setempat,” papar Daryatmo di Kalimantan Selatan, Senin (19/2).

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar PT Adaro mempercepat pembangunan PLTU di Kalimantan, menurutnya pembangunan PLTU ini penting, karena merupakan pembuktian bentuk hilirisasi pemanfaatan batu bara. “Pembangunan PLTU ini juga terkait dengan interkoneksi listrik di

Kalimantan. Hubungan ketersambungan listrik di Kalimantan, saya kira sangat penting, justru di tempat penghasil batu bara yang luar biasa banyak,” paparnya.

Daryatmo juga menyoroti persoalan yang harus diantisipasi pasca penambangan yaitu reklamasi cekungan tanah bekas galian tambang batu bara. Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi penambangan, dia mengatakan saat ini kedalaman penggalian batu bara sudah mencapai hampir 200 meter dari permukaan tanah, sementara titik permukaan tanah berada pada 150-an meter di atas permukaan laut. Selain itu, juga terjadi penurunan permukaan tanah atau subsiden.

“Maka persoalan yang harus diantisipasi adalah aspek-aspek reklamasi, selain reklamasi juga terjadi penurunan permukaan atau subsiden. Jadi aspek-aspek lingkungan dengan reklamasi, mengembalikan humus-humus permukaan tanah yang subur, penurunan juga harus dijamin agar tidak menjadi kolong-kolong seperti di pulau-pulau timah,” tandas politisi asal dapil Jateng itu. ■ (eko/sf)

sebanyak itu menurutnya ada kontradiksi, karena jika dilihat, jalan-jalan umum di sekitar wilayah pertambangan yang tidak diterangi lampu, padahal tiang listrik sudah terpasang berjejeran. Menurutnya, CSR perusahaan seharusnya punya konsep yang mengembangkan terangnya daerah setempat.

“Kita mengamati dari angka yang disajikan Rp 40 miliar, kontras dengan

**Persoalan yang harus diantisipasi pasca penambangan adalah reklamasi cekungan tanah bekas galian tambang batu bara.**

## Pengelolaan Potensi Energi di Sumbar Belum Optimal

**Komisi VII DPR RI menilai pengelolaan potensi energi di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal. Hal itu disebabkan masih adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan perlu dukungan penuh dari Pemerintah Pusat.**



Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase

foto: dev/hr

**T**erkait persoalan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Ferry Kase mengatakan, diperlukan suatu payung hukum yang baik untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, baik kendala dari sisi masyarakat, maupun kendala dari sisi aturan perundang-undangannya.

“Kita perlu memikirkan secara serius hal ini. Bagaimana mengatur agar sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya, perlu ada diskusi dan kajian yang lebih jauh serta komprehensif dalam mempersiapkan payung hukum tersebut,” ucap Ferry di Padang, Sumatera Barat, Selasa (20/2).

Ferry menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumbar masih sangat kecil, dan bergantung pada APBN. Gubernur Sumbar

juga telah menyampaikan kepada Komisi VII DPR agar dapat mendorong Pemerintah Pusat, supaya dapat melihat lebih jauh kepada daerah-daerah yang memiliki potensi bernilai strategis.

“Pemprov Sumatera Barat perlu dukungan pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan payung hukum bagi badan-badan usaha yang ada di Sumatera Barat ini,” imbuah politisi F-Hanura itu.

Ferry mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan saat pertemuan Komisi VII DPR dengan Gubernur Sumbar serta pertemuan dengan PT. Bukit Asam dan PT. Semen Padang harus ditindaklanjuti dengan baik.

“Hal-hal yang berkaitan dengan potensi strategis di daerah harus benar-benar dapat diimplementasikan sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang - Undang Dasar 1945. Eksekusi dari BUMN yang ada merupakan kepanjangan tangan dari negara, oleh karenanya harus dapat berfungsi secara layak dan baik,” pungkasnya. ■ (dep/sf)



Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi saat mengikuti kunjungan kerja meninjau Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)

## STPI Curug Diharapkan Penuhi Kebutuhan Tenaga Pilot

**Anggota Komisi V DPR Henky Kurniadi mengharapkan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang, Banten, mampu menghasilkan para lulusan pilot lebih banyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja pilot di Indonesia.**

“ Kita harus bangga ada sekolah tinggi penerbangan di Indonesia yang didirikan pada zaman Soekarno.

Untuk itu, saya dari Komisi V DPR RI berharap dan mendorong agar sekolah penerbangan ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja pilot di Indonesia,” ujar Henky saat mengikuti

rangkaian kunjungan kerja ke STPI Curug, Tangerang, Senin (19/2).

Kunjungan ke STPI ini untuk melihat langsung sarana dan prasarana yang tersedia, sekaligus mengetahui hambatan yang dihadapi oleh STPI. “Saat ini pertumbuhan pilot di Indonesia tidak seimbang dengan kebutuhan pilot yang

ada,” ungkapnya. Lebih lanjut Henky mengatakan, kendala yang dihadapi STPI adalah jumlah pesawat latih yang masih minim. Selain itu, instruktur juga masih kurang.

“Seorang calon pilot memerlukan 150 jam terbang. Masalah lainnya yaitu penyediaan pesawat latih yang



foto: andri/ir

## BIJB Harus Bernuansa Kearifan Lokal

Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso menaruh harapan pada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang berlokasi di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat harus mampu memberikan nuansa kearifan lokal yang mencerminkan kultur Jawa Barat. Ini penting karena Bandara ini akan menjadi gerbang Indonesia di Jawa Barat bagi masyarakat mancanegara, karenanya Komisi V nantinya akan terus melakukan pengawasan dalam pembangunan bandara ini sampai selesai.



Anggota Komisi V DPR RI Agung Budi Santoso

foto: hendrar/hr

dikenakan pajak tinggi,” katanya. Menurutnya, beberapa tahun ke depan kita mengharapkan tidak ada lagi pilot asing yang bekerja di Indonesia. “Kita meminta BP SDM dan Kepala Sekolah STPI membuat perencanaan lima tahun ke depan, seperti sarana dan prasarana yang harus dipenuhi agar bisa menunjang aktivitas belajar di STPI tersebut,” tegasnya.

Terkait permasalahan tingginya pajak pengiriman pesawat latihan, Henky menjelaskan, Komisi V DPR akan mencoba membicarakan persoalan itu dengan pihak terkait, sehingga pajak pembelian pesawat latihan dapat diberikan kelonggaran. ■ (man/sc)

“Kami selalu berpesen setiap bandara internasional adalah gerbang Indonesia dari sisi udara, sehingga harus ada kesan bahwa orang yang turun di Kertajati harus betul-betul merasakan nuansa daerah Jawa Barat, bangunan dan ornamen harus mencerminkan Jawa Barat,” ungkap Agung usai meninjau Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati, Jawa Barat, Rabu, (21/2).

Politisi Partai Demokrat ini pun menegaskan bahwa pihaknya ingin mengawal pembangunan bandara ini agar menjadi bandara yang terbaik untuk saat ini. Karenanya, ia akan selalu memberi masukan agar hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan.

“Kita ingin jadikan bandara di Kertajati ini menjadi bandara terbaik saat ini. Kita mulai atur dari sisi infrastrukturnya, terminalnya, dan sarana pendukung lainnya harus diperhatikan. Kita kasih masukan agar BIJB dibangun sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ungkap Agung.

Wakil Ketua BURT ini akan terus memantau perkembangan

pembangunan bandara ini, kontrol dan pengawasan Komisi V terhadap bandara ini diharapkan mampu mempercepat progres pembangunan agar dapat digunakan tahun ini. “Target kita berharap musim haji ke depan akan ada penerbangan awal. Kita akan kontrol lagi, dan kita akan tinjau ke sini lagi nanti,” sambungnya.

Legislator dapil Jabar I ini juga memberikan apresiasi terhadap pelaksana proyek BIJB ini karena selama pembangunan bandara ini tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi. Sehingga ketaatan dalam menjalankan SOP dan standar keselamatan kerja perlu ditiru bagi seluruh kontraktor yang saat ini tengah mengerjakan proyek-proyek pemerintah ditengah maraknya kecelakaan kerja yang terjadi.

“Selama pembangunan bandara ini tidak ada kecelakaan. Artinya, semua pekerjaan sudah sesuai dengan SOP. Kita apresiasi BIJB yang bangun bandara ini, dan ini wajib dipertahankan, tidak boleh ada kecelakaan kerja sedikitpun,” tutup Agung. ■ (hs/sc)



Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna berdialog dengan pendamping PKH di Papua

foto: rreka/cd

## Pendamping PKH Harus Mendapat Bantuan APBD

**Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna prihatin atas terjadinya kesenjangan insentif untuk para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Sorong, Papua Barat. Muna mengaku mendapat keluhan, bahwa pendamping PKH hanya mendapatkan gaji dari Pemerintah Pusat saja.**

“Biasanya pendamping PKH itu juga akan mendapatkan tambahan gaji dari APBD yang ada. Tapi disini tidak ada,” ungkap Muna usai pertemuan Tim Kunker Komisi VIII DPR RI dengan Pemkot Sorong, Pimpinan SKPD terkait, Kanwil Kemenag, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kepala BPBD, dan Pimpinan BAZNAS, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, di Kota Sorong, Papua Barat, baru-baru ini.

Muna menjelaskan, memang setiap daerah mempunyai problematika, baik itu keadaan alam ataupun kemampuan

**Memang setiap daerah mempunyai problematika, baik itu keadaan alam ataupun kemampuan pemerintah. Tetapi, seharusnya hal itu dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat maupun Komisi VIII DPR dengan mitra kerjanya.**

pemerintah. Tetapi menurutnya, seharusnya hal itu dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat maupun Komisi VIII DPR dengan mitra kerjanya. Diketahui, insentif Pendamping PKH dari Pusat sebesar Rp 2,3 juta untuk cakupan daerah Papua Barat, dirasa kurang.

“Tadi banyak juga yang *curhat* kepada kami bahwa Rp 2,3 juta itu sangat kecil. Naik *speedboat* ke sana kemari tidak cukup, dan uang bisa habis untuk transportasi saja. Mereka menginginkan ada dana tambahan dari pemerintah daerah,” ungkap Muna sembari berharap ke depannya para pendamping PKH difasilitasi dengan mendapatkan bantuan dari APBD.

Di sisi lain, politisi F-NasDem itu mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Walikota Sorong pada pertemuan tersebut. “Saya menyesalkan kenapa Walikota tidak hadir, karena dia adalah penguasa anggaran dan kebijakan. Padahal jikalau hadir, dapat dikomunikasikan besaran anggaran dan keadaan di sini,” ujar politisi dapil Jateng VI ini. ■ (ran/sf)

# P2TP2A Aceh Masih Kurang Memadai

Anggota Komisi VIII DPR RI Siti Mufatahah menilai fasilitas di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh masih kurang memadai.

“Sangat disayangkan fasilitas di dalamnya masih sangat perlu menjadi perhatian, khususnya fasilitas yang kurang memadai karena kenyamanan dalam menerima korban atau pelapor itu sangat diperlukan,” ungkap Siti sapaan akrabnya, usai melakukan peninjauan dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke P2TP2A Provinsi Aceh, Kamis (15/2).

Misalnya saja, lanjutnya, masih ditemukan kerusakan infrastruktur serta minimnya ketersediaan ruang konsultasi di pusat pelayanan. “Ini perlu diperbaiki dan para korban seharusnya mendapatkan tempat yang lebih *privacy* sehingga mereka merasa nyaman untuk melapor ataupun berkonsultasi,” jelas Politisi F-PD itu.

Lebih lanjut Siti menyoroti kesejahteraan para Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas dan dinilainya sangat perlu diperhatikan kesehatannya. Pasalnya, para SDM yang bertugas rata-rata merupakan

pegawai honor atau kontrak yang hanya diupah sebesar Rp 450.000/bulan.

“Oleh karena itu, saya sangat mendorong kepada pemerintah kalau bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga nantinya di dalam bekerja mereka jauh lebih semangat dan memiliki tanggung jawab,” harapnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, kualifikasi SDM yang tidak sesuai dengan kualifikasi bidang yang diperoleh di akademisi dalam penanganan korban juga menjadi satu hal yang disoroti dan diharapkan ke depannya menjadi hal yang wajib dibenahi pemma setempat.

“Selain itu, ke depannya juga harus ada promosi yang berisikan informasi kepada masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk melaporkan diri, baik sebagai korban atau pelaku sehingga nantinya akan direhabilitasi atau diberikan pembinaan,” tutupnya.

Dinas PP&PA Provinsi Aceh sebelumnya menjelaskan perlu adanya penambahan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat

gempa yang menimbulkan kerusakan di sejumlah ruangan dan atap.

“Kami juga membutuhkan *safe house* untuk para korban kekerasan seksual, karena selama ini kami mengalokasikan korban ke *safe house* di tempat lain. Ke depan nantinya jika sudah ada *safe house* kita bisa lebih aman menangani para korban secara lebih baik lagi,” ungkapnya. ■ (tra/sc)



Foto: Haris/od

Tim Kunker Komisi VIII DPR RI meninjau P2TP2A Provinsi Aceh

Masih ditemukan kerusakan infrastruktur serta minimnya ketersediaan ruang konsultasi di pusat pelayanan. “Ini perlu diperbaiki dan para korban seharusnya mendapatkan tempat yang lebih *privacy* sehingga mereka merasa nyaman untuk melapor ataupun berkonsultasi,”

# Komisi XI Dorong Pemerintah Kucurkan Kredit Mikro

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengatakan, Pemerintah telah mendorong perbankan untuk menjalankan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdasarkan ekonomi kerakyatan. Ia mendorong pemerintah untuk mengucurkan kredit mikro, guna memaksimalkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Sulawesi Selatan.



Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari memberikan cenderamata kepada perwakilan Pemprov Sulsel

“ Menggerakkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan itu biasanya melalui koperasi dan UMKM. Maka dari itu, saya terus mendorong Kementerian Keuangan untuk mengucurkan kredit mikro tanpa agunan khusus UMKM atau UMi (Ultra Mikro) sebagai bagian dari implementasi ekonomi kerakyatan yang lebih spesifik,” kata Eva saat mengikuti rangkaian pertemuan bersama OJK, BI, Lembaga Penjamin, dan Perbankan, di Makassar, Sulsel, Senin (19/2).

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman menilai, Sulsel merupakan salah satu provinsi yang perkembangan ekonominya sangat baik.

“OJK dan Bank Indonesia Sulsel pun telah berupaya memacu perekonomian dalam kebijakan moneterinya, seperti kelonggaran tentang gini ratio di penjaminan dan alternatif pengkreditan atau pembiayaan,” tegasnya. ■ (gd/sf)

foto: guntur/od

# DPR Pertanyakan Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Kepri

Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar mengaku terkejut dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2017 yang menukik tajam hingga mencapai 2,01 persen. Sangat jauh dibanding pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional. Padahal di tahun-tahun sebelumnya pun masih di atas 5 persen.

“ Ini apa faktor penyebabnya. Apakah karena faktor masih belum *clear* antara Badan Otorita Batam dengan Pemerintah Provinsi. Ini menjadi pertanyaan kepada kita semua. Mengapa Kepri pertumbuhan ekonominya sangat jauh tertinggal dibanding nasional,” kata Willgo saat pertemuan antara Tim



Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar

foto: sofyan/od

Kunker Komisi XI DPR bertemu dengan Pemprov Kepri dan mitra kerja di Batam, Kepri, Kamis (15/2).

Politisi F-Gerindra itu melihat, masih adanya irisan-irisan regulasi antara Badan Otorita dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Misalnya perizinan yang harus melalui dua pintu. Menurutnya, regulasi ini menjadi kurang menarik bagi investasi yang akan masuk.

“Karena memang perizinan lebih panjang prosesnya. Perlu penyederhanaan lagi. Apakah Otorita akan dipertahankan, atau apakah kembali ke Otonomi Daerah. Kalau ingin dipertahankan, harus *clear*. Jangan tumpang tindih regulasinya,” tandas Willgo.

Willgo melihat Batam sebagai ikon industri di Kepri, sehingga iklim investasi yang kondusif harus diberikan prioritas. Namun justru ia mendengar banyak perusahaan-perusahaan luar yang merelokasi industri ke luar Batam, bahkan keluar negeri. Artinya, lanjut Willgo, ada situasi dan kondisi yang tidak kondusif

secara perekonomian.

“Kita berharap pemerintah harus mengeksekusi permasalahan ini, dan mencari solusi dari permasalahan yang menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kepri. Kita berharap pemerintah untuk segera turun tangan dan mencari alternatif program yang memadai, yang cocok untuk bisa mendorong kembalinya pertumbuhan ekonomi Kepri, minimal menyamai pertumbuhan ekonomi nasional,” papar Willgo.

Politisi asal dapil NTB itu menambahkan, dampak dari menukiknya pertumbuhan ekonomi berakibat terhadap angka pengangguran yang meningkat serta turunnya penerimaan sektor pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak maksimal.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno (F-PDI Perjuangan) menekankan, akibat dari menurunnya pertumbuhan ekonomi, berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, pertumbuhan

ekonomi nasional merupakan agregat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita tahu, Batam dirancang menjadi *free trade zone*, dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumatera. Sehingga kalau pusat pertumbuhan ekonomi andalan seperti Batam ini turunnya luar biasa, tentu akan berpengaruh pada Provinsi Kepri secara keseluruhan, atau Sumatera, dan agregat kepada Indonesia,” tandas politisi asal dapil Kalbar itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Panusunan Siregar menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2017 hanya mencapai 2,01 persen. Padahal pada tahun 2016 tercatat 5,02 persen.

“Selama tahun 2017, perekonomian Kepri mengalami kelesuan dan secara triwulanan hanya tumbuh pada kisaran 2 persen, yang jauh di bawah angka nasional. Konsumsi rumah tangga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi,” jelas Panusunan. ■ (sf)

## BPJS Ketenagakerjaan Harus Proaktif Jangkau Pekerja Informal

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh Dede Yusuf Macan Efendi berharap, BPJS Ketenagakerjaan lebih proaktif dalam menarik calon anggotanya, terutama yang berasal dari pekerja informal termasuk pekerja rentan. Termasuk memaksimalkan sosialisasi kepada pekerja sektor informal.**

BPJS Ketenagakerjaan juga berkewajiban melindungi pekerja informal, termasuk pekerja rentan seperti tukang becak, pemusik dan lain-lain. Namun terkadang, ketidaktahuan dari pekerja rentan yang disebabkan kurangnya sosialisasi atas program tersebut, membuat sedikit para pekerja rentan yang masuk dalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Dede Yusuf dalam pertemuan dengan BPJS Ketenagakerjaan di Banda Aceh, Aceh, Rabu (28/2).

Dede yakin dengan informasi dan edukasi dari Tim BPJS Ketenagakerjaan akan menarik para pekerja di sektor informal, khususnya pekerja rentan untuk masuk menjadi anggota program tersebut.

Sementara terkait dengan permasalahan kurangnya kemampuan untuk membayar iuran secara berkelanjutan dari pekerja rentan,

pihaknya berjanji akan mencari payung hukum agar pekerja rentan secara otomatis mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita sedang mencari formula yang tepat agar pekerja rentan ini bisa menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mungkin dananya bisa menggunakan CSR BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya itu perlu payung hukum. Kami akan membahas ini ke depan,” imbuh Dede.

Ditambahkan politisi Fraksi Partai Demokrat ini, pekerja rentan ini perlu dilindungi agar ketika mereka mendapat kecelakaan kerja, tidak jatuh miskin karena mengeluarkan biaya besar untuk berobat. Dan apabila terjadi resiko kepada pekerja rentan, keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan santunan yang dapat diterima oleh keluarga yang ditinggalkan.

Menanggapi hal itu, Direktur Perencanaan dan Strategis BPJS



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Dede Yusuf (kiri)

Ketenagakerjaan, Sumarjono mengatakan, pihaknya akan lebih proaktif dalam mensosialisasikan program tersebut, khususnya kepada para pekerja informal. Selain itu, ia juga berharap pekerja rentan ini, dananya bisa dianggarkan melalui bantuan pemerintah seperti program Jamkesmas dengan skema PBI.

Turut hadir dalam kunjungan kerja ini, beberapa Anggota Komisi IX DPR RI, diantaranya Suir Syam, Khaidir Abdurrahman, Julianus Poteleba, Tina Nur Alam, Nihatul Wafiroh, Irgan Chairul Mahfiz, Adang Sudrajat, Betti Sadiq Pasadigoe, dan Aliyah Mustika Ilham. ■

(ayu/sf)

# Pendidikan di Sumut Perlu Perhatian Serius

**Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto menilai kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara belum menggembirakan, berdasar pada data neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Utara ini menyampaikan, persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD di luar transfer daerah belum mencapai 20 persen.**



“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tingkat 69,51 atau sedikit di bawah rata-rata nasional, sebesar 69,55. Uji kompetensi guru baik guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK hasilnya di bawah rata-rata nasional,” jelas Djoko di ruang pertemuan Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (28/2).

**Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan. Dari 1.833.000 ruang kelas, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (hanya 26 persen), dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan.**

Selain itu, politisi Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, indeks Integritas Ujian Nasional di Sumut masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan, hasil akreditasi sekolah yang mendapat kategori A untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK jumlahnya di bawah 30 persen.

Menurutnya berbagai permasalahan klasik sepanjang tahun 2017 dan awal tahun 2018 masih saja terjadi, di antaranya adalah masalah karakter, guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana. Bagi Djoko masalah karakter merupakan persoalan serius bagi bangsa Indonesia.

Sedangkan, persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Untuk persoalan kurikulum, terlihat pada begitu banyaknya materi muatan yang harus diajarkan kepada anak didik, dan proses pembelajaran yang cenderung menghafal dibanding dengan berpikir kritis.

Selain itu, masih kata Djoko, persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan. Dari 1.833.000 ruang kelas, hanya 470.000 ribu ruang kelas dalam kondisi baik (hanya 26 persen), dan hanya 50 persen sekolah



Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjianto

yang memiliki alat peraga pendidikan.

“Memperhatikan berbagai hal tersebut, pendidikan perlu mendapat perhatian serius, seksama, dan kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Apalagi, anggaran pendidikan kita cukup besar,” ungkap Djoko.

Diketahui, anggaran pendidikan untuk tahun 2018 mencapai 20 persen atau sebesar Rp 441 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 2.204 triliun. Bahkan, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir tidak kurang dari Rp 3.500 triliun untuk anggaran pendidikan. ■ (eko/sf)



Tim Kunker Komisi X DPR RI meninjau sejumlah sekolah di Manado

## Rehabilitasi Sekolah di Sulut Urgen Dilakukan

**Masifnya kerusakan infrastruktur di beberapa sekolah di Sulawesi Utara, membutuhkan rehabilitasi segera. Otoritas dinas pendidikan setempat diimbau proaktif merehabilitasi ruang- ruang kelas yang rusak di sejumlah sekolah. Selain untuk kenyamanan para siswa, rehabilitasi ruang kelas juga untuk meningkatkan mutu pendidikan.**

**A**nggota Komisi X DPR RI Venna Melinda yang dimintai komentarnya di Manado, Sulut, Kamis (1/3), mengungkapkan, dari data Kemendikbud 2016, ternyata kerusakan yang paling banyak terjadi di tingkat SMP, sebanyak 2.944 rusak ringan dan 1.271 rusak berat. Sementara tingkat SMA, setidaknya 980 sekolah rusak ringan dan 44 rusak berat. Di SMK 1.302 rusak ringan dan 25 rusak berat. Sementara di SD kerusakan mencapai 7.657 rusak ringan dan 591 rusak berat.

“Kunjungan sekolah di Manado ini membuka mata saya, bahwa harus ada tindakan nyata dari Kemendikbud, untuk lebih proaktif dalam merehabilitasi ruang kelas yang rusak. Ini baru di Manado, belum di kota-kota lain seperti Tomohon

atau Bitung. Tentu keadaannya, akan lebih parah lagi karena lokasinya jauh dari pusat kota. Artinya, harus ada semacam satgas rehabilitasi yang berkoordinasi dengan Disbud Sulut supaya cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah ini,” papar Venna.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, rehabilitasi kelas harus dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, survei lokasi dengan sistem *mapping*, sehingga titiknya bisa dicari sekaligus dinilai tingkat kerusakannya. Kedua, koordinasi dengan dinas bersangkutan seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, dan kantor kecamatan/ kelurahan setempat untuk proses administrasi dan kelancaran distribusi bantuan.

Ketiga, lanjut Venna, pengawasan pembangunan dengan koordinasi

masyarakat sipil, TNI/Polri supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. “Jika ada indikasi penyimpangan, jangan takut melapor kepada DPR, karena fungsi kami adalah pelayan masyarakat. Jadi, dengan ketiga tahapan ini, saya harap bisa membantu proses rehabilitasi kelas,” imbuh Venna.

Menyinggung soal kekurangan guru di Sulut, pada 2018 ini Sulut membutuhkan sebanyak 1.052 guru PNS. Guru-guru honorer masih dominan. Namun, guru-guru non PNS yang berjumlah 1.739 ini mendapatkan penghasilan standar UMP. Setiap tahun penghasilan guru honorer meningkat dari Rp 2,6 juta jadi Rp 2,8 juta. Venna menyuarakan agar para guru honorer itu mendapat pelatihan dari industri pariwisata dan agrobisnis setempat.

“Saya punya ide untuk memberikan bantuan teknis bagi guru honorer dalam bentuk pelatihan. Bantuan teknis ini harus melibatkan pihak swasta/BUMN. Saya lihat di Sulut ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa pariwisata dan agrobisnis. Jadi pelatihan guru honorer ini bisa diarahkan ke arah situ untuk menciptakan SDM unggul di Sulut,” tutup Venna. ■ (mh/sf)



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyerahkan cenderamata kepada mitra kerja

## Gini Ratio Sumsel Relatif Tinggi

**Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengapresiasi kinerja Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Palembang yang meningkat di kisaran 5,5 persen. Bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Namun capaian ini menyisakan adanya gap di sisi Gini Ratio.**

“Gini Ratio Sumsel masih relatif tinggi, sekitar 3,6 persen. Saya pikir ini juga sebagai sebuah tantangan untuk Pemprov Sumsel agar bisa lebih mengefisienkan permodalan yang ada,” kata Heri, saat pertemuan dengan pejabat di Pemprov Sumsel dan mitra kerja Komisi XI DPR RI di Palembang, Sumsel, Kamis (15/2).

Politisi F-Gerindra itu mengingatkan, sektor pertanian sebagai penghasil komoditas pangan juga harus menjadi perhatian Pemprov Sumsel. Mengingat saat ini fokus pertumbuhan ekonomi Sumsel pada sektor padat modal. Hal itu menyebabkan gap ketimpangan semakin terlihat. Sehingga, semakin tinggi

pertumbuhannya, maka ketimpangannya pun tinggi.

“Kami berharap, bisa segera dibuatkan kebijakan agar ada keberpihakan kepada para pelaku petani dan bidang usaha yang bergerak di bidang pertanian, sehingga kebutuhan pangan khususnya di wilayah Sumsel tidak tergantung ke daerah lainnya,” imbuh politisi asal dapil Jabar itu.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Fathan juga menyoroti tentang kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik, terungkap angka kemiskinan di Sumsel hanya turun sedikit dari Nasional.

“Artinya apa, kita perlu kerja keras lagi. Pemprov dan sektor perbankan harus mencari inovasi-inovasi, sehingga tingkat kemiskinan bisa turun lebih signifikan lagi. Karena kita tahu pembangunan infrastruktur tidak ada artinya, jika tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkash politisi F-PKB itu.

Apalagi, sambung Fathan, jika melihat survey BPS terkait penyerapan tenaga kerja nasional turun sebesar 260 ribu atau sekitar 15 persen. “Artinya bahwa pembangunan infrastruktur harus berimplikasi juga pada orang bisa bekerja, membeli, dan orang bisa meningkatkan daya beli,” analisisnya.

Fathan juga menilai, program yang ada belum memberikan dampak yang cukup signifikan dari segi penyerapan tenaga kerja, penanggulangan kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan.

“Karena saya lihat, Sumsel ini kan maju di kotanya saja. Tapi kita melihat Kabupaten Musi Rawas dan Empat Lawang dimana petani-petani masih sangat menderita, dan tingkat keterbelakangan juga sangat luar biasa,” tandas politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■ (ndy/sf)

## Perempuan Libya Ingin Tingkatkan Keterwakilan di Parlemen

**Libya sedang menata sistem politiknya setelah mengalami konflik berkepanjangan. Salah satu yang ingin ditingkatkan adalah partisipasi politik perempuan Libya agar keterwakilannya di parlemen terus meningkat.**

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Siti Hediati mengemukakan hal itu usai menerima delegasi Parlemen Libya di Ruang Tamu Pimpinan DPR, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/2). Parlemen Libya ingin banyak belajar dari Indonesia bagaimana berdemokrasi yang baik. Menurut Titiek, sapaan akrabnya, berdemokrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan negara masing-masing.

“Mereka ingin belajar bagaimana berdemokrasi yang baik seperti di Indonesia. Belajar demokrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi negaranya. Mereka juga ingin kerja sama pendidikan agar banyak pelajar Libya bisa belajar di Indonesia, begitu juga sebaliknya,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Menyinggung soal kuota keterwakilan perempuan di parlemen, ternyata antara Indonesia dan Libya menerapkan kuota yang sama yaitu 30 persen. Libya baru



# Setjen dan BK DPR Komitmen Lawan Penyalahgunaan Narkotika

**Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti menegaskan bahwa Indonesia saat ini sudah memasuki taraf peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang yang berbahaya, bahkan cenderung meningkat. Untuk memerangi narkoba, harus dimulai dari lingkungan yang kecil terlebih dahulu, seperti lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan tempat kerja.**

**G**una mendukung upaya tersebut, dan sebagai komitmen dalam melawan penyalahgunaan narkoba, Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Obat Terlarang. Dalam kegiatan yang bekerjasama

dengan BNN Provinsi DKI Jakarta itu, juga dilakukan tes urin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.

“Kami mengadakan kegiatan ini sesuai dengan semangat dari program pemerintah dalam upaya memerangi

narkoba,” ungkap Maya, panggilan Damayanti, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2).

Maya kembali menegaskan bahwa Setjen dan BK DPR RI berkomitmen untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan segala turunannya. “Untuk pegawai ASN yang belum mengikuti tes urin pada hari ini, maka kita akan menjadwalkan kembali untuk dilakukan tes urin. Untuk yang tidak bisa hadir hari ini, sedang cuti, sakit atau sedang dinas keluar kota,” ungkapnya.

Maya memastikan, jika ditemukan pegawai ASN yang positif



Pejabat Setjen dan BK DPR RI dengan BNN Provinsi DKI saat membuka acara Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Obat Terlarang

**“Kami mengadakan kegiatan ini sesuai dengan semangat dari program pemerintah dalam upaya memerangi narkoba,”**

foto: kresno/od



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Siti Hediati Soeharto

foto: runit/od

memenuhinya 20 persen saja dari sekitar 200 anggota. Perlu waktu, memang, agar para wanita di Libya dan Indonesia bisa diterima dan dipercaya masyarakat untuk duduk di parlemen. Indonesia juga, sambung Titiek, sedang berjuang agar mendapatkan lebih banyak kursi lagi di DPR.

“Mudah-mudahan ke depan kaum wanita mendapat banyak kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakil rakyat di parlemen. Parlemen Libya mengapresiasi kita dan ingin belajar banyak dari kita. Sebagai negara mayoritas Islam bagaimana wanita mendapat kepercayaan agar bisa duduk di parlemen,” tutupnya. ■ (mh/sc)

menyalahgunakan narkotika dan obat terlarang, maka akan diberikan sanksi yang tegas, mulai dari rehabilitasi hingga pemecatan sesuai dengan UU ASN.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNNP DKI Jakarta Johnypol Latupeirrisa mengapresiasi atas kegiatan tes narkoba bagi pegawai ASN Setjen dan BK DPR RI. Dia menilai bahwa lembaga DPR merupakan lembaga yang sangat penting dan sangat vital karena di lembaga inilah dibentuk berbagai perundang-undangan.

“Perundang-undangan inilah yang digunakan pemerintah dalam melakukan keputusan, sehingga lembaga ini harus bersih dan seluruh pegawainya juga harus bersih dari narkoba,” ungkapnya. ■ (skr/sf)

# BK DPR Gelar Seminar Nasional Program Sosial Pemerintah

**Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menjelaskan, pelaksanaan Seminar Nasional bertema 'Program Perlindungan Sosial dan Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia' bertujuan untuk memantau jalannya program-program perlindungan sosial yang dijalankan oleh Pemerintah, berikut dampak positif yang dihasilkan.**

**D**emikian dikatakan Johnson usai membuka Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, dengan tema 'Program Perlindungan Sosial dan Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia'. Hadir beberapa narasumber dalam acara ini, diantaranya Endah Sulistyansih (Kementerian Sosial RI), Kalsum Komaryani (Kementerian Kesehatan RI), dan Khamim (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

"Kita ingin melihat bagaimana sesungguhnya pelaksanaan dari program-program yang sudah dilakukan oleh Pemerintah itu, yaitu berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan bantuan-bantuan sosial yang sudah digulirkan sejak Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," ungkap Johnson di Ruang Pansus C DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (28/2).

Johnson memaparkan, kegiatan itu terselenggara atas arahan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Fahri Hamzah, agar DPR RI memiliki data-data mengenai indeks kesejahteraan sosial di tiga bidang kesejahteraan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Sehingga nantinya dapat menjadi pembahasan lanjutan dengan *stakeholder* terkait di dalam rapat-rapat komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya.

"Pak Fahri memerlukan data-data mengenai indeks kesejahteraan sosial itu, terutama yang berkaitan dengan tiga bidang tadi. Nah ini tentu sangat diharapkan oleh beliau, karena dengan begitu beliau akan mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai program-program yang dilakukan oleh Pemerintah, dan ini akan

bisa dijadikan bahan oleh beliau dan disampaikan kepada komisi terkait," katanya.

Selain itu, Johnson juga mengungkapkan seminar itu akan menghasilkan dokumen, yang nantinya diserahkan kepada masing-masing komisi terkait untuk dibahas, apakah ada masalah-masalah di dalam pelaksanaannya sehingga nantinya diperlukan suatu instrumen hukum.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, dengan adanya seminar tersebut, pihaknya akan lebih sering melakukan survey-survey seperti yang sekarang dilakukan, mengingat selama ini penelitian yang dilakukan masih berbentuk turun ke lapangan yang sifatnya kualitatif.

"Sekarang, survey kita lebih luas spektrumnya dan datanya bisa dipakai oleh siapapun termasuk pegawai DPR, komisi dan AKD dan lainnya. Saya pikir itu tujuannya tentu ke depan Pusat Penelitian akan sering melakukan survey dalam rangka membangun semacam pusat data," ucapnya. ■ (ndy/sf)



Suasana Seminar Nasional yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR

foto: oji/od



foto: suci/od

Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI Ermalena berdialog dengan pasien RSUD dr. Saiful Anwar di Malang, Jatim

## Isu Jual Beli Ginjal di RSUD dr. Saiful Anwar Malang Tidak Benar

Komisi IX DPR RI memastikan, isu adanya kasus jual beli ginjal di RSUD dr. Syaiful Anwar Malang, Jawa Timur yang mencuat di pemberitaan media pada Desember 2017 lalu adalah tidak benar.

“Menurut penjelasan Dirut RSUD dr. Saiful Anwar ternyata ini tidak benar,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Ermalena, usai peninjauan dan pertemuan dengan Direksi RSUD dr. Saiful Anwar, di Malang, Jatim, Rabu (28/2).

Oleh karena itu, lanjut Ermalena, Komisi IX DPR meminta pihak RSUD dr. Saiful Anwar untuk membuat *press release* agar tidak lagi terjadi kesimpangsiuran berita. Karena akibat pemberitaan yang tidak benar itu, dampaknya sangat luar biasa.

“Dampak *image* itu kepada rumah sakit menjadi sangat tidak baik. Dan kalau itu terjadi, maka harus dilakukan investigasi oleh Kementerian Kesehatan,” tegas politisi F-PKB itu.

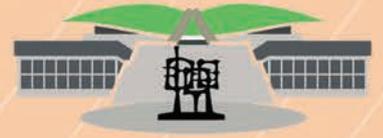
Sebelumnya saat pertemuan dengan Tim Komisi IX DPR, Dirut RSUD dr. Saiful Anwar Restu Kurnia Tjahjani menjelaskan, terkait kasus jual beli ginjal di RSUD dr. Saiful Anwar Malang tidak benar.

Menurutnya, RSUD dr. Saiful Anwar sudah melakukan audit internal. Kasus donor ginjal adalah untuk kepentingan transplantasi ginjal hanya berdasarkan keikhlasan pendonor, dan dipastikan tak ada praktik jual beli.

Namun demikian, dengan mencuatnya kasus ini di media, pihak RSUD dr. Saiful Anwar menghentikan proses donor ginjal tersebut. Sementara sampai saat ini, ada 6 pasien gagal ginjal yang menunggu donor ginjal. Dan pendonor yang siap mendonorkan ginjalnya dengan sukarela tercatat ada 30 orang. ■ (sc/sf)



**Dengan mencuatnya kasus ini di media, pihak RSUD dr. Saiful Anwar menghentikan proses donor ginjal tersebut. Sementara sampai saat ini, ada 6 pasien gagal ginjal yang menunggu donor ginjal.**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima kunjungan BKPRMI dan FKPPI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/2). FOTO: JAKA/HR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Delegasi Parlemen Libya yang dipimpin Halimah Alsadegh Ali Al Aib, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/2). FOTO: RUNI/HR



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Penyuluhan Bahaya Narkotika dan Obat Terlarang, yang bekerjasama dengan BNN Provinsi DKI Jakarta, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/2). FOTO: ANDRI/HR